

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Suara Merdeka

Wilayah: Kabupaten Rembang

Serapan Anggaran DPUTARU–DPKP Paling Rendah

<http://www.suaramerdeka.com/regional/muria/245524-serapan-anggaran-dputaru-dpkp-paling-rendah>

REMBANG – Catur wulan terakhir menjelang berakhirnya tahun anggaran 2020, serapan anggaran 18 lembaga yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di Rembang tercatat masih minus. Angka penyerapan anggaran belasan OPD-instansi tersebut masih di bawah 50 persen.

Dua OPD menorehkan catatan paling minus dalam penyerapan anggaran APBD 2020 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Data yang dirilis terkini oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Rembang, DPUTARU baru menyerap anggaran sebesar Rp 16.016.728.491 atau 24,11 persen. Sedangkan penyerapan anggaran DPKP baru sebesar Rp 1.463.026.010 atau 19,31 persen.

Selain dua OPD tersebut, satu OPD lainnya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) penyerapan anggarannya juga tercatat rendah, yaitu sebesar Rp 1.159.575.188 atau 28,04 persen.

Sehingga, baru ada 30 lembaga di lingkup Pemkab Rembang yang penyerapannya di atas 50 persen. Penyerapan anggaran paling besar adalah Dinas Perhubungan yang mencapai 74,16 persen atau Rp 9.855.514.388.

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran daerah oleh seluruh OPD dan instansi Pemkab Rembang baru mencapai angka 68,22 persen atau sebesar Rp 344.122.629.325. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Muallif menyatakan, banyak kegiatan muncul melalui mekanisme APBD Perubahan.

“Dampaknya menjadikan serapan anggaran turun. Kurang lebihnya serapan anggaran seperti itu (68,22 persen),” terang Muallif, Kamis (29/10).

Menurutnya, Pemkab sudah melakukan upaya terhadap OPD atau instansi yang serapan anggarannya masih rendah. Upaya itu antara lain adalah menggelar Rakor POP. Rakor tersebut salah satu materinya adalah monitoring dan evaluasi (monev) serapan hingga percepatan.

Sementara itu, Kabag Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Rembang, Wahyu Dian Prihatanto mengungkapkan, progres serapan oleh OPD didapat dari rata-rata antara serapan anggaran dengan progres pembangunan.

Umumnya, kata Wahyu, pelaksanaan fisik lebih tinggi daripada yang telah di-SPJ-kan. “Data kemarin belum akurat karena banyak dinas belum melaporkan. Pekan depan kami baru ke dinas. Kemarin juga ada yang protes progresnya tidak terupdate,” tandas Wahyu. (Ilyas al-Musthofa)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH